



REPUBLIK INDONESIA

PIDATO MENTERI KEUANGAN

**TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PANDANGAN FRAKSI-
FRAKSI DPR RI ATAS KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-
POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN TAHUN ANGGARAN 2026**

Disampaikan pada:

Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jakarta, 1 Juli 2025

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.*

Yang kami hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

1. Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir di Sidang Paripurna DPR hari ini untuk melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai bagian dari proses pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
2. **Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi di DPR RI atas pandangan dan masukan yang konstruktif terhadap KEM-PPKF Tahun Anggaran 2026.** Seluruh pandangan dan masukan tersebut merupakan bagian dari semangat kolektif untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang responsif terhadap harapan besar dari seluruh masyarakat agar pengelolaan APBN efektif sebagai instrumen kebijakan pembangunan, tetap sehat dan akuntabel.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

3. **Perekonomian global masih penuh dengan ketidakpastian,** tatanan dunia bergeser memasuki era multipolar. Fragmentasi geopolitik dan meningkatnya rivalitas antarnegara mengikis semangat globalisasi dan multilateral, diganti dengan proteksionisme dan orientasi nasionalistik yang mengedepankan prinsip *"my country first"*. Eskalasi konflik geopolitik bahkan peperangan menjadi penghalang aktivitas ekonomi, menghambat arus perdagangan, menekan minat investasi, dan meningkatkan risiko volatilitas pasar keuangan global.

4. **Prospek pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global melemah.** Bank Dunia dalam laporan bulan Juni 2025 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya 2,3% (yoy) pada 2025, lebih rendah dari proyeksi IMF pada April yang sebesar 2,8%. Ekonomi AS, Tiongkok, Jepang, dan Eropa direvisi ke bawah. Tekanan global ini diperburuk oleh harga komoditas yang *volatile*, nilai tukar yang tertekan, dan suku bunga yang bertahan tinggi.
5. **Dalam situasi perekonomian global yang mengalami tekanan, ekonomi Indonesia di triwulan I tahun 2025** tumbuh 4,87% (yoy), ditopang konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar yang tumbuh 4,89% (yoy). Ekspor tumbuh signifikan hingga 6,78% (yoy) dengan ekspor produk hilirisasi memberikan nilai tambah jauh lebih besar dibandingkan ekspor komoditas mentah.
6. **Konsumsi Pemerintah berkontraksi 1,38% (yoy) dipengaruhi high base effect belanja di triwulan I 2024.** Belanja pada triwulan yang sama tahun lalu tinggi karena belanja pelaksanaan pemilu dan belanja bansos yang dipercepat untuk mitigasi dampak El Nino. Di sisi lain, hal ini merupakan konsekuensi dari strategi Pemerintah merekonstruksi alokasi belanja, agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian. **Investasi menghadapi tantangan situasi global yang masih penuh ketidakpastian dengan level pertumbuhan relatif rendah di 2,12% (yoy).**
7. **Dari sisi produksi, kinerja sektor utama memberikan optimisme terhadap aktivitas ekonomi. Industri Pengolahan** yang mencakup 19,25% dari PDB, tumbuh 4,55% (yoy) ditopang aktivitas hilirisasi. **Sektor Perdagangan** dengan cakupan 13,22% PDB tumbuh 5,03% (yoy). **Sektor Pertanian**, yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh signifikan hingga 10,52%. Kinerja sektor ini didukung oleh meningkatnya produktivitas seiring penyederhanaan aturan distribusi pupuk bersubsidi. Dengan deregulasi tersebut, Pemerintah menjamin ketersediaan pupuk sesuai dengan periode tanam; produksi beras meningkat ke level 19,09 juta ton di periode Januari

hingga Juni 2025, dibandingkan 16,86 juta ton di periode yang sama tahun 2024 atau meningkat 13,2%.

8. **Produksi beras nasional tahun ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara produktif di kawasan ASEAN.** Dengan meningkatnya produksi, stok beras Perum Bulog per pekan ketiga Juni 2025 mencapai 4,17 juta ton—tertinggi sejak Bulog didirikan lebih dari lima dekade lalu. Capaian ini memperkuat optimisme untuk swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan.
9. **Perekonomian domestik terus menunjukkan tren perbaikan hingga akhir semester I 2025.** Inflasi tahunan per Mei 2025 tercatat 1,6% (yoy), menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20 dan ASEAN. Nilai tukar Rupiah pun membaik signifikan setelah sempat menyentuh Rp16.943 per USD pada 10 April 2025 kembali ke kisaran Rp16.200 per USD di akhir semester I 2025.
10. **Kinerja ekonomi domestik yang tetap kondusif perlu terus dijaga melalui konsistensi kebijakan dan sinergi yang kuat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan baik di pusat maupun di daerah.** Berbagai kebijakan harus tetap responsif terhadap kondisi yang sangat dinamis ini, untuk terus menjaga agenda pembangunan nasional dan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia di sekitar 5% (yoy) hingga akhir tahun.
11. **Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh.** Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, dan percepatan industrialisasi nasional. Pencapaian ini akan menjadi fondasi untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjawab tantangan era multipolar yang sarat ketidakpastian.
12. **Pemerintah meyakini bahwa untuk mewujudkan ketahanan nasional, pembangunan ekonomi tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.** Intervensi negara diperlukan secara proporsional untuk

melakukan koreksi atas kegagalan pasar (*market failure*) dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. **Prinsip utama yang mendasari adalah “*the greatest good for the greatest many*”, yakni kebijakan harus menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin rakyat.** Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional benar-benar berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemerataan.

13. **Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka,** Presiden Prabowo selalu mengingatkan untuk terus berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bapak Presiden secara konsisten menyuarakan posisi Indonesia sebagai negara nonblok, yang menjunjung tinggi kedaulatan nasional dan tidak berpihak pada kutub kekuatan manapun. Panduan dari Bapak Presiden ini sangat relevan dan penting ketika situasi geo-ekonomi politik global makin menegang, *fragmented*, dan menjadi multipolar.
14. **Dengan latar belakang situasi tersebut, KEM-PPKF 2026 dirancang untuk meredam gejolak global dan sekaligus mengakselerasi transformasi struktural yang diarahkan pada 8 (delapan) agenda prioritas:** ketahanan pangan; ketahanan energi; Makan Bergizi Gratis (MBG); mewujudkan pendidikan bermutu; kesehatan yang berkualitas; pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Oleh karena itu, **kebijakan fiskal 2026 diarahkan pada penguatan kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan menjaga iklim investasi, serta pembiayaan yang *prudent* dan *sustainable*.** Prinsip efisiensi dan efektivitas akan menjadi roh utama dalam setiap alokasi anggaran.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

15. **Pemerintah mencermati secara seksama pandangan dan catatan dari fraksi-fraksi DPR RI, baik yang berkaitan dengan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja, defisit, maupun pembiayaan.** Pemerintah

juga menyambut baik dorongan untuk menjaga kesehatan fiskal, dengan tetap memberikan ruang kebijakan yang cukup bagi percepatan transformasi ekonomi. Perkenankan kami menyampaikan tanggapan atas pandangan **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrat**, terkait Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2026.

16. **Kami sangat berterima kasih atas dukungan Anggota Dewan yang terhormat terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang diusulkan Pemerintah di rentang 5,2% hingga 5,8% (yoy).** Kami juga sangat menghargai tanggapan yang lebih optimis dari Fraksi Gerindra dengan batas atas pertumbuhan ekonomi hingga 6,3% dan Fraksi PKB dengan batas atas 6,0%. Usulan angka Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB tersebut mempertimbangkan arah pencapaian target pertumbuhan 8% (yoy) pada 2029. Sementara itu, Fraksi Partai Golkar memberikan catatan agar Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dimaksimalkan ke batas atas 5,8% (yoy). **Pemerintah mempunyai semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.** Namun demikian, upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menghadapi tantangan yang tidak mudah dengan kondisi global saat ini.
17. **Dari sisi *demand*, konsumsi rumah tangga akan didorong tumbuh hingga sekitar 5,5% (yoy).** Hal ini penting mengingat kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 55% PDB. Daya beli terus dijaga untuk mencapai target pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, antara lain dengan pengendalian inflasi sesuai target Pemerintah, penciptaan ketahanan pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja.
18. **Berbagai program untuk mendorong konsumsi masyarakat juga akan diterapkan.** Makan Bergizi Gratis terus ekspansif, diharapkan mampu menciptakan *multiplier* yang tinggi di masyarakat, dengan penciptaan rantai pasok yang tersebar di seluruh penjuru tanah air dan jumlah tenaga kerja yang

terlibat langsung hingga 1,7 juta tenaga kerja. Program strategis lain seperti Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dengan target lebih dari 80 ribu koperasi dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi 2,3 juta debitur. Berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Subsidi Upah, dan program lainnya akan terus disalurkan guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.

19. **Untuk investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB), diperkirakan tumbuh hingga 5,9% (yoy) atau secara nominal dibutuhkan investasi baru di tahun 2026 sekitar Rp7.500 triliun.** Komponen PMTB berkontribusi hampir 30% PDB. Jika digabungkan dengan Konsumsi Rumah Tangga, keduanya berkontribusi hampir 85% terhadap perekonomian.
20. **Pembentukan Danantara diharapkan mampu menjadi *game changer* baru dalam mengakselerasi investasi di Indonesia.** Sebagai *sovereign wealth fund*, Danantara mengelola strategi investasi jangka panjang, dengan tujuan utama me-*leverage* aset negara dengan menarik partisipasi investor global. **Investasi Danantara difokuskan pada sektor strategis bernilai tambah tinggi yang memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menyerap tenaga kerja dengan *skill* dan upah lebih baik.** Sektor yang diprioritaskan selaras dengan *roadmap* hilirisasi nasional, seperti industri kabel tembaga, baterai, kendaraan listrik, dan semikonduktor, termasuk *data center*. Dengan strategi ini, investasi diharapkan memberikan *multiplier effect* pada ekonomi yang lebih besar.
21. **Dari sisi ekspor,** hilirisasi secara konsisten menopang kinerja surplus neraca perdagangan sejak pertama kali digulirkan. Ke depan, upaya penguatan hilirisasi terus dilakukan untuk menciptakan *multiplier effect* lebih besar bagi ekonomi. Ekspor ditargetkan tumbuh hingga 6,8% (yoy) dengan asumsi hilirisasi terus berlanjut dan program penguatan ekspor berbasis produk bernilai tambah tinggi yang sekaligus menguatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global berjalan sesuai target. Pertumbuhan ekonomi global juga

tumbuh sejalan dengan proyeksi IMF dan World Bank, masing-masing 3,0% dan 2,4 persen (*yoy*) untuk tahun 2026.

22. **Dari sisi produksi, pilihan sektor sejalan dengan dukungan yang akan diberikan oleh Danantara.** Keberlanjutan hilirisasi menjadi strategi andalan Pemerintah karena nilai tambah yang dihasilkan. *Output* industri pengolahan mencakup 19% dari total PDB. Hilirisasi yang ditargetkan sangat luas, dari nikel, tembaga, hingga bauksit, diharapkan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. **Sektor industri pengolahan** ditargetkan tumbuh hingga 5,3% (*yoy*) namun dapat tertahan hanya 4,7% jika terjadi gangguan pada permintaan global dan pelemahan harga komoditas global.
23. **Perdagangan besar dan eceran** yang berkontribusi 13,2% pada PDB diasumsikan tumbuh hingga 5,7% (*yoy*) didukung optimisme terhadap konsumsi rumah tangga yang meningkat. Program MBG, subsidi dan kompensasi, hingga perlindungan sosial menopang kinerja sektor ini, termasuk semakin mudahnya transaksi melalui *e-commerce*. Sementara itu, **sektor Informasi dan Komunikasi** yang saat ini baru berkontribusi sebesar 4,4% terhadap PDB ditargetkan tumbuh hingga 8,3% (*yoy*) seiring masifnya perkembangan menuju ekonomi digital, termasuk *data center* sebagai tulang punggung bagi pengembangan ekonomi digital.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

24. **Untuk asumsi inflasi, Pemerintah menghargai masukan dari Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB untuk rentang inflasi di 2% - 4%, sedikit di atas target Pemerintah yaitu 1,5% - 3,5%.** Fraksi Gerindra berpendapat perlu untuk memberikan ruang bagi peningkatan daya beli masyarakat, sementara Fraksi PKB berpendapat bahwa target Pemerintah terlalu moderat. **Di dalam menentukan target 1,5% - 3,5%, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.** Rentang target tersebut ditetapkan dengan pertimbangan yang komprehensif yaitu: (1) menjaga ekspektasi harga agar tetap terjangkau di tengah ketidakpastian global, volatilitas harga pangan dan energi, serta risiko cuaca ekstrem; (2) melindungi daya beli masyarakat

berpendapatan rendah, karena inflasi yang tinggi memberikan beban yang lebih besar bagi kelompok rentan; serta (3) mendukung iklim investasi dan konsumsi domestik yang sehat. **Pemerintah tetap antisipatif untuk menjaga ruang fleksibilitas.** Koordinasi erat Pemerintah Pusat dan Daerah dengan otoritas moneter melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah memungkinkan penyesuaian respons fiskal dan moneter apabila terjadi tekanan harga. Langkah ini pernah ditempuh di akhir 2023 hingga awal 2024 pada saat harga beras naik tajam akibat El Nino.

25. **Kami menghargai masukan Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB untuk rentang nilai tukar.** Fraksi Gerindra mengusulkan di level Rp16.200 - Rp16.500 per Dolar AS sebagai bentuk kehati-hatian terhadap berbagai risiko global, yaitu perang tarif, suku bunga tinggi di AS, dan ketidakpastian geopolitik. Fraksi PKB berpendapat untuk mempersempit rentang antara Rp16.300 - Rp16.700 per Dolar AS. Pemerintah menyampaikan bahwa usulan nilai tukar pada kisaran Rp16.500 - Rp16.900 untuk memberikan ruang antisipatif dan fleksibilitas dalam menghadapi tekanan eksternal. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat kepercayaan pasar.
26. **Strategi penerbitan SBN yang *prudent* dan fleksibel juga akan terus menjadi prioritas, diselaraskan dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia dalam menjaga inflasi dan nilai tukar.** Dengan demikian, imbal hasil SBN 10 tahun akan tetap terkendali pada rentang 6,6% - 7,2%. Kami menghargai masukan dari Fraksi Partai Golkar agar *yield* SBN diupayakan pada batas bawah 6,6%.
27. **Di tengah situasi ketidakpastian saat ini, SBN menjadi instrumen yang masih diminati baik investor global maupun domestik.** Investor global melakukan beli bersih sebesar Rp40,8 triliun secara *year to date* per 25 Juni 2025. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun dari 7,02% pada akhir tahun lalu menjadi 6,62% pada 26 Juni 2025. **Koordinasi kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia terus dilakukan. Penerbitan SBN dan kebijakan moneter**

- dikoordinasikan sehingga tidak menimbulkan efek *crowding out*. Menjaga keseimbangan antara *pricing* yang menarik bagi investor dan menjaga *cost of fund* yang rendah juga menjadi pertimbangan.
28. **Bagian terakhir dari komponen asumsi dasar ekonomi makro, terkait harga ICP serta *lifting* baik minyak maupun gas.** Untuk ICP, Fraksi PKB memberikan masukan rentang asumsi yang lebih tinggi, usulan Pemerintah di USD60-80 per barel sementara dari Fraksi PKB di rentang USD65 - 85 per barel. ICP sangat dipengaruhi oleh kebijakan produksi OPEC+, permintaan minyak terutama dari Tiongkok, transisi energi global, serta potensi eskalasi konflik geopolitik yang *unpredictable*. Pemerintah menetapkan rentang asumsi ICP dengan sangat berhati-hati agar asumsi harga minyak tidak menjadi sumber deviasi fiskal yang terlalu besar, baik terhadap pendapatan negara maupun belanja subsidi dan kompensasi energi.
29. **Mengenai *lifting*, sangat terkait dengan semangat mewujudkan ketahanan energi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden.** Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan eksplorasi, perbaikan keekonomian proyek, dan memberikan insentif untuk mendorong investasi. Sebagai *update* terkini, pekan lalu Bapak Presiden meresmikan peningkatan *lifting* minyak, dengan kontribusi tambahan 30 ribu barel per hari dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu – Bojonegoro. Ini merupakan *milestone* menuju target *lifting* nasional 900 ribu hingga 1 juta barel per hari pada 2029 – 2030.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati

30. Pemerintah menghargai pandangan dari **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrat** terkait dukungan optimalisasi pendapatan negara.
31. Pemerintah berkomitmen melakukan optimalisasi pendapatan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis perpajakan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya

- alam. Pendekatan ini dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. **Untuk itu, reformasi perpajakan menjadi pilar utama** tidak hanya untuk meningkatkan rasio pajak, tetapi juga membangun sistem perpajakan yang adil, efisien, dan kredibel. Pemerintah melakukan pengembangan dan integrasi ***Core Tax Administration System, Customs Excise Information System and Automation (CEISA)***, dan **Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI)**. Ketiga sistem ini akan saling terhubung guna memperkuat pengawasan, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data dalam proses pemungutan penerimaan negara, baik dari pajak, kepabeanan, maupun PNB.
32. Sistem perpajakan Indonesia juga harus dibangun agar **kompatibel dengan perkembangan ekonomi digital dan perubahan sistem perpajakan global**. Untuk itu, Pemerintah aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional untuk mengadopsi pilar-pilar perpajakan internasional, termasuk penerapan pajak atas kegiatan ekonomi digital.
 33. **Mobilisasi pendapatan juga dilakukan melalui reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan barang milik negara (BMN)**. Reformasi pengelolaan SDA dilakukan dengan perbaikan sistem penataan izin, peningkatan transparansi pelaporan produksi, dan integrasi data lintas K/L melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). Sementara itu, pengelolaan BMN diarahkan kepada penciptaan nilai tambah, baik melalui pemanfaatan kerja sama maupun skema monetisasi yang akuntabel.
 34. Menanggapi pandangan **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat** mengenai dukungan untuk terus menjaga efektivitas dan efisiensi belanja negara guna mendukung program prioritas, Pemerintah sepakat dan menyampaikan penghargaan atas dukungan Anggota Dewan yang terhormat.
 35. Belanja negara akan difokuskan untuk **mendorong penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi**, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga

stabilitas serta mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah diarahkan pada sektor-sektor strategis, seperti ketahanan pangan dan energi, penguatan pendidikan, kesehatan, penguatan Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, penguatan Koperasi Desa Merah Putih serta penguatan riset teknologi, yang mampu menciptakan efek pengganda tinggi terhadap perekonomian.

36. **Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah melalui penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, penyaluran transfer ke daerah berbasis kinerja, pemantauan dan evaluasi, serta penguatan pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP).** Melalui upaya tersebut diharapkan agar belanja daerah dapat memberikan kontribusi optimal dalam peningkatan kualitas layanan publik di daerah, peningkatan kualitas pembangunan di daerah, dan mendukung capaian program prioritas pembangunan nasional. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan upaya penguatan belanja K/L yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional di daerah melalui sinergi program yang lokasi penerima manfaatnya berada di daerah antara lain melalui dukungan percepatan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, serta Inpres pembangunan jalan dan irigasi di daerah.
37. **Reformasi kebijakan subsidi dan perlindungan sosial akan terus dijalankan** untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas dalam melindungi daya beli dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi **yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan dan berbasis penerima manfaat langsung**, dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program-program perlindungan sosial **berbasis pemberdayaan** juga terus didorong, seperti pelatihan vokasi, fasilitasi akses usaha dan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Di sisi lain, **sinergi antar program perlinsos dari berbagai kementerian dan lembaga juga terus**

diperkuat. Melalui berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan, belanja negara menjadi instrumen yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkecil kesenjangan antardaerah dan antarkelompok masyarakat sekaligus dapat mewujudkan keadilan antar generasi.

38. Selanjutnya, menanggapi pandangan **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrat** mengenai pentingnya menjaga defisit di bawah 3%, diversifikasi instrumen pembiayaan, serta sinergi kebijakan fiskal moneter.
39. Pemerintah menyampaikan penghargaan atas pandangan Anggota Dewan yang terhormat mengenai pentingnya menjaga pengelolaan fiskal yang sehat, *prudent*, dan berkelanjutan. **Kebijakan ini ditempuh tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek, tetapi juga menopang kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang.** Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong kegiatan produktif yang dapat memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang.
40. **Pembiayaan investasi terus didorong agar lebih efektif dan berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan sektor-sektor strategis lainnya.** Pemerintah akan mengoptimalkan berbagai skema pembiayaan, termasuk mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan membangun sinergi dan mengharmonisasikan peran Badan Layanan Umum (BLU), BUMN, dan Danantara untuk mengakselerasi agenda pembangunan. **Pemerintah juga akan terus mendorong akselerasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.** Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, **Pemerintah dapat mengoptimalkan**

peran Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai instrumen yang fleksibel untuk mengantisipasi ketidakpastian.

41. **Kolaborasi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan pemerintah daerah juga akan terus ditingkatkan untuk menciptakan sinergi kebijakan pembiayaan yang lebih solid.** Dalam konteks ketahanan makroekonomi, sinergi dan kolaborasi ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, pengendalian inflasi, serta perluasan akses pembiayaan yang inklusif. Pemerintah juga mendorong inovasi pembiayaan daerah melalui pemanfaatan pinjaman daerah yang produktif serta penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak pembangunan di daerah.

Ibu, Bapak, para Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami muliakan,

42. Demikian jawaban dan tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2026 dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2026. Tanggapan yang lebih lengkap terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR kami sampaikan secara tertulis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang kami sampaikan ini.
43. Marilah kita teguhkan kembali komitmen dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang adil, transparan, dan berkelanjutan, dengan berpegang pada Al Quran surat An-Nahl Ayat 90 untuk selalu "*berlaku adil dan berbuat kebajikan*". Disamping itu, dalam Surat Al-Hasyr Ayat 7, Allah Swt juga mengingatkan bahwa kesejahteraan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Semoga, dengan semangat keadilan untuk kesejahteraan kita dapat mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera.
44. Sebagai penutup, atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama segenap Anggota Dewan yang terhormat. Semoga Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2026 dapat berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang

telah ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa membimbing dan menjaga kita. *Aamiin.*

*Billahit-Taufiq wal Hidayah, Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.*

Jakarta, 1 Juli 2025

a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan,

ttd

Sri Mulyani Indrawati